

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (ultimate outcome)	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, hal 15-17 dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 20)
Fenomena / Penyebab	Rendahnya Capaian Tahun 2019 dengan nilai 55,96 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

T., Warsito, T., Fribadi, U., Nurmadi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN. *Coraka Prab: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 22 - 36.

Meningkatnya kepuasan masyarakat (intermediate outcome)	
Indikator	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Kunir (Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	Kualitas pelayanan PATEN kepada masyarakat belum maksimal dibuktikan dengan hasil dokumen IKM tahun 2021 sebesar 85,80% belum memenuhi Target P-Renstra Tahun 2018 -2023 sebesar 88% sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19)

Keterkaitan Hubungan Variabel/Indikator berdasarkan PP 12 Tahun 2022 bahwa : pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;(Pasal 2 Ayat 3 huruf a)

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Jurnal pembangunan dan kebijakan publik, Im Rusdiana, Djodjo Sokarjjo S " Pengaruh Koordinasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut."

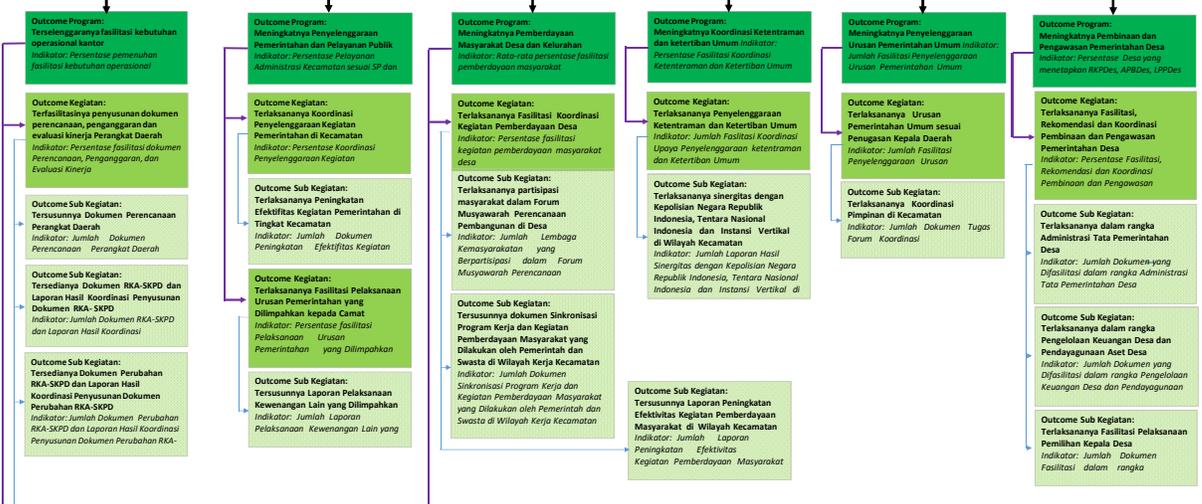
Keterkaitan Hubungan Variabel/Indikator berdasarkan keputusan MENTERI PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP/26/M.PAN/2/2004 bahwa : Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan

Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan (immediate outcome)	
Indikator	Persentase hasil fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya fungsi fasilitas dan koordinasi kecamatan yang ditindaklanjuti, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Rekapitulasi yang tertuang pada LKIP tahun 2021 dengan target 88 % hanya mencapai 81 % sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2)

Crosscutting dapat dijelaskan pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/27.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPKMDesa dan RPKDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa (immediate outcome)	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan, dalam hal ini di tahun 2021 hanya APDDes semua desa (11 Desa) tidak tepat waktu, sedangkan untuk RPKDes dan LPDDes tepat waktu

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Perbup Lumajang No. 96 Tahun 2019 yang menyebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan



Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Outcome Kegiatan:
Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah
Indikator: Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Outcome Kegiatan:
Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah
Indikator: Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator: Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD

Outcome Sub Kegiatan:
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator: Jumlah Laporan Rekonsiliasi

Outcome Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator: Jumlah fasilitas

Outcome Kegiatan:
Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah
Indikator: Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD

Outcome Sub Kegiatan:
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Outcome Sub Kegiatan:
Terselenggaranya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Outcome Sub Kegiatan:
Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Outcome Sub Kegiatan:
Terselenggaranya Penyediaan Bahan/Material
Indikator: Jumlah Paket Bahan/Material

Outcome Sub Kegiatan:
Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu
Indikator: Jumlah Laporan Fasilitas

Outcome Sub Kegiatan:
Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Outcome Kegiatan:
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Outcome Kegiatan:
Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
Indikator: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Outcome Sub Kegiatan:
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.
Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Masyarakat

Outcome Sub Kegiatan:
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Outcome Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup

Outcome Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelesterian Lingkungan Hidup.
Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelesterian Lingkungan Hidup



Kunir, 01 Agustus 2023

KEMUKA KUNIR

Imron Rosyadi

M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200601 1 003